

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Satuan Kerja Kementerian Negara Lingkup KPPN Yogyakarta

Lucia Dea Alvina¹, Marfuah²

¹Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, e-mail: alvinadea21@gmail.com

²Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, e-mail: 923120102@uii.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2023

Received in revised form 2 Juni 2023

Accepted 10 Juni 2023

Available online 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the timeliness of submission of treasurer accountability reports. The sample collection technique uses purposive sampling method. The data source used in this study is primary data, namely data collected from respondents using questionnaires directly. There were 204 respondents who were used as the sample of this study. A quantitative approach was used in this study with multiple linear regression analysis techniques, and hypothesis testing, namely using the t test and f test. The results of this study indicate that human resources, information technology and the rule of law have a positive effect on the timely submission of accountability reports.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Rule of Law, and Timeliness.

1. Pendahuluan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Keuangan yang menjalankan kewenangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Keuangan, untuk menghimpun dana atas beban anggaran, dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu seksi yang menunjang kinerja di KPPN yaitu Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Seksi Verifikasi dan Akuntansi sendiri memiliki tiga tugas utama yaitu melakukan verifikasi atas LPJ bendahara satker, melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan yang disusun oleh satker, dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Satker yang ditangani KPPN Yogyakarta yaitu 281 satker bendahara pengeluaran dan 61 satker bendahara penerimaan.

Dari tugas utama yang dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi salah satu tugasnya yaitu Verifikasi LPJ Bendahara Satker. Dari pengamatan penulis faktor yang mendorong ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia disini dipengaruhi oleh keberadaan Kuasa Penggunaan Anggaran di kantor tersebut, pengaruh kemampuan dari bendahara itu sendiri apakah telah menguasai aplikasi SAKTI atau SPRINT yang digunakan dan juga apakah bendahara terkait sering mengikuti pelatihan yang diadakan KPPN serta jam terbang dalam pengerjaan LPJ Bendahara. Sedangkan dari jam terbang sendiri masih ada beberapa bendahara baru sehingga terkadang masih bingung untuk menyelesaikan LPJ tersebut. Para

bendahara satuan kerja sudah terampil menggunakan sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan serta jika para bendahara diundang untuk pelatihan mereka sangat responsif untuk menghadiri acara tersebut.

Selanjutnya ada Sarana Pendukung yang di dalamnya terdapat faktor pendukung berupa Teknologi Informasi. Dari segi teknologi informasi ada salah satu satker yang sudah beberapa kali hampir tidak tepat waktu dalam pelaporan LPJ Bendahara dikarenakan terkendala jaringan internet. Fasilitas pendukung lainnya seperti komputer juga sangat penting untuk menunjang ketepatan waktu pelaporan LPJ Bendahara tersebut. Faktor teknologi informasi juga di dukung dengan aplikasi yang telah di sediakan oleh kementerian keuangan yaitu SPRINT dan SAKTI. Tetapi terkadang dua aplikasi tersebut mempunyai kendala yaitu terkadang ada sistem yang error. Tetapi jika ada masalah terkait sistem tersebut jika bendahara tersebut mengalami kesulitan respon KPPN dianggap cepat jika bendahara berkonsultasi mengenai kesulitan yang mereka hadapi.

Aturan hukum juga salah satu faktor yang mendorong ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara. Menurut Peraturan Jendral Perbendaharaan PER-03/PB/2014 apabila satker tidak menyerahkan Bendahara LPJ kepada KPPN hingga batas waktu yang ditentukan, satuan kerja nantinya akan dikenakan sanksi administratif yaitu pengembalian surat perintah membayar (SPM) yang diajukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut. Berdasarkan aturan tersebut satker yang ada di lingkup KPPN telah mematuhi aturan terkait, namun terkadang satker hanya mementingkan pengumpulannya saja sehingga kemungkinan kesalahan masih ada sehingga harus diperbaiki ulang yang nantinya hanya membuang-buang waktu.

Menurut penelitian oleh Binsar (2013) faktor sumber daya manusia sangat berperan penting dalam ketepatan waktu dikarenakan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi satuan kerja maka akan menambah presentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selain itu aturan hukum juga mempengaruhi ketepatan waktu karena dengan adanya perangkat aturan hukum dan sanksi yang jelas maka diharapkan mampu untuk mendorong ketepatan waktu.

Penelitian lain dilakukan oleh (Jumardi *et al.*, 2022) Hasilnya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Karena apabila aparatur pemerintahan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dan didukung pula pemanfaatan TI maka akan mempengaruhi perilaku kerja.

Sumber daya manusia (SDM) adalah orang-orang yang merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengelola kualitas, mengalokasikan sumber daya keuangan, dan mengembangkan strategi dan tujuan keseluruhan organisasi (Samsudin, 2010). Variabel sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap proses ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Semakin terlatih dan terampil sumber daya manusia yang ada maka ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara akan mudah dicapai.

Hal ini di dukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Binsar (2013), Puspaningsih (2017), Ali (2020) dan (Jumardi *et al.*, 2022). Semakin tinggi tingkat sumberdaya bendahara terkait maka penyusunan laporan keuangan semakin mudah dipahami dan proses penyampaian laporan keuangan semakin cepat.

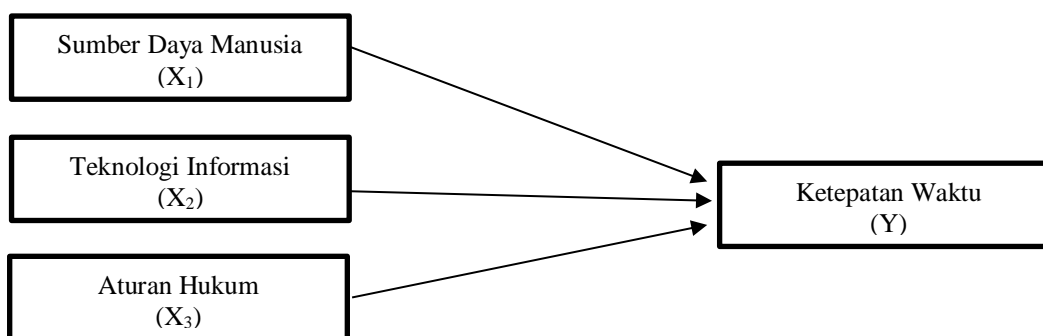
Teknologi informasi bukan hanya teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi merupakan alat yang melipatgandakan kemampuan manusia, dan komputer juga dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia (Nahartyo & Indriasari, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses penyusunan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara secara akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jumardi *et al.*, 2022) dan Puspaningsih (2017) mendukung pernyataan tersebut dikarenakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan baik dari segi keakuratan maupun kecepatan.

Aturan hukum dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Bendahara ini dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. Apabila satker tidak menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka satker akan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara) yang diajukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.

Hal ini juga di dukung oleh penelitian Binsar (2013) aturan hukum mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan ekonomi pemerintah/instansi di tingkat UAKPA. Adanya aturan perundang-undangan yang jelas tentang pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN, ditambah dengan penetapan sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat mempermudah ketepatan waktu pelaporan.

Berdasarkan teori yang telah di paparkan dapat disusun model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

H1: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

H3: Aturan Hukum berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

2. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah bendahara pengeluaran dan penerimaan satuan kerja di lingkup KPPN Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melakukan penyebaran kuesioner atau angket. Melalui metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang biasanya menghasilkan informasi dari sudut pandang tertentu yang sesuai dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bendahara yang menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban satuan kerja di lingkup KPPN Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data hasil kuesioner yang dikumpulkan langsung oleh peneliti kepada responden di bagian keuangan pada satuan kerja lingkup KPPN Yogyakarta. Penulis memberikan kuesioner kepada responden melalui staff verifikasi dan akuntansi KPPN yang akan disebar melalui grup LPJ Bendahara. Penelitian ini menggunakan pernyataan dengan skor 1-4 dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator variabel dari peneliian yang pernah dilakukan sebelumnya. Variabel dependen adalah variabel yang utama atau menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel-variabel yang akan di uji adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan aturan hukum (sebagai variabel independent) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara (variabel dependen).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara (Y). Menurut Gordon & Narayanan (1984) ketepatan waktu atau *timeliness* menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disampaikan secara teratur untuk mencerminkan perubahan keadaan perusahaan yang memengaruhi perkiraan dan keputusan pengguna. Ketepatan waktu juga mengacu pada waktu antara penyajian informasi yang diperlukan dan frekuensi informasi yang dilaporkan. Informasi yang tepat waktu bergantung pada kemampuan manajer untuk menanggapi insiden dan masalah. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi hasil keputusan. Berikut indicator ketepatan waktu yang digunakan menurut Puspaningsih (2017):

1. *Timeliness*
2. Sistematis Waktu

Sedangkan variabel independent dalam penelitian ini yaitu

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah elemen paling strategis dalam organisasi yang perlu diakui dan dirangkul oleh manajemen. Hanya orang yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, sumber daya manusia juga menjadi sumber pemborosan dan inefisiensi dalam banyak hal. Oleh karena itu, pertimbangan unsur manusia merupakan salah satu syarat dalam keseluruhan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja (Siagian, 2009). Berikut indikator yang digunakan dalam variabel sumber daya manusia menurut (Binsar, 2013):

1. Kesesuaian latar belakang pendidikan.
2. Pemahaman atas uraian pekerjaannya.
3. Pemahaman atas pelatihan dan sosialisasi yang pernah diikuti.
4. Pemahaman atas aplikasi penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.

Pada variabel sumber daya manusia ini, penulis akan mengukur menggunakan lima pernyataan dengan skor 1-4 yang berarti 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 4 menyatakan sangat setuju.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah proses, akuisisi, dan kompilasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan peraturan. Teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk menyimpan, menyimpan, dan memanipulasinya, yang merepresentasikan informasi strategis. untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2014). Berikut indikator yang digunakan dalam variabel teknologi informasi menurut (Binsar, 2013):

1. Ketersediaan komputer yang memadai.
2. Kualitas dan kuantitas perangkat.
3. Kualitas program aplikasi.
4. Pelaksanaan update berkala terhadap program komputer.
5. Peran sarana pendukung dan jaringan internet dalam meningkatkan kualitas pekerjaan.

Pada variabel teknologi informasi ini, penulis akan mengukur menggunakan lima pernyataan dengan skor 1-4 yang berarti 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 4 menyatakan sangat setuju.

Aturan Hukum

Mengenai aturan hukum penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014. Apabila satker tidak menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka satker akan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara) yang diajukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut. Berikut indikator yang digunakan dalam variabel teknologi informasi menurut (Binsar, 2013):

1. Kualitas peraturan.
2. Kemudahan pemahaman.
3. Kepatuhan terhadap peraturan.
4. Sanksi pelanggaran

Pada variabel aturan hukum ini, penulis akan mengukur menggunakan lima pernyataan dengan skor 1-4 yang berarti 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 4 menyatakan sangat setuju.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas), uji koefisien determinasi, uji linear berganda, uji T dan uji F.

3. Results and Analysis

Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi responden dari penelitian ini adalah para bendahara satuan kerja di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Kuesioner disebar pada tanggal 07 Desember – 19 Desember 2022 pada masa penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara. Waktu tersebut dipilih dikarenakan memudahkan penyebaran dan pengumpulan kuesioner bagi peneliti. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 341 responden melalui grup *whatsapp* bendahara. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 204 (59%) yang masuk.

Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan diisi langsung oleh responden, diperoleh hasil dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik		Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki Laki	66	32,35%
	Perempuan	138	67,65%
Total		204	100%

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 66 laki-laki (32,35%) dan 138 perempuan (67,65%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih mendominasi peran sebagai bendahara.

Karakteristik Berdasarkan Usia

Karakteristik responden selanjutnya adalah usia. Usia dikelompokkan menjadi 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan > 40 tahun. Berikut ini diperoleh data responden yang disajikan pada tabel 2:

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Karakteristik		Jumlah	%
Usia	20-30	8	3,92%
	31-40	77	37,75%
	>40	119	58,33%
Total		204	100%

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang atau 3,92% berusia 20-30 tahun, 77 orang atau 37,75% berusia 31-40 tahun, dan 119 orang atau 58,33% berusia lebih dari 40 tahun.

Karakteristik Berdasarkan Status Bendahara

Kriteria berikutnya dalam pemilihan responden penelitian ini yaitu dengan menggunakan status dari bendahara tersebut. Status bendahara ini dibagi menjadi dua yaitu bendahara yang bersertifikat dan bendahara dengan non-sertifikat. Berikut disajikan responden yang dikategorikan berdasarkan status dari bendahara tersebut:

Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan Status Bendahara

Karakteristik		Jumlah	%
Status	Bersertifikat	171	83,82%
	Non-Sertifikat	33	16,18%
Total		204	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 171 bendahara bersertifikat (83,82%) dan 33 bendahara non-sertifikat (16,18%).

Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya kriteria responden penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendidikan terakhir dari bendahara tersebut. Pendidikan bendahara ini dibagi menjadi lima yaitu SMA/SMK, Diploma, Sarjana, Magister, dan Professor. Berikut disajikan responden yang dikategorikan berdasarkan pendidikan dari bendahara tersebut:

Tabel 4. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Karakteristik		Jumlah	%
Pendidikan	SMA/SMK	35	17,16%
	Diploma	42	20,59%
	Sarjana	120	58,82%
	Master	7	3,43%
	Doktor	0	0%
Total		204	100%

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 35 bendahara yang memiliki jenjang pendidikan SMA/SMK (17,16%), 42 bendahara yang memiliki jenjang pendidikan Diploma (20,59%), 120 bendahara yang memiliki jenjang pendidikan sarjana (58,82%) dan 7 bendahara yang memiliki jenjang pendidikan magister (3,42%). Sedangkan tidak ada bendahara yang memiliki jenjang pendidikan professor.

Karakteristik Berdasarkan Bidang Keilmuan

Setelah dikelompokkan berdasarkan pendidikannya kemudian responden di kategorikan lagi berdasarkan bidang keilmuannya. Kategori dibagi menjadi dua yaitu bidang keilmuan ekonomi dan non-ekonomi sebagai berikut:

Tabel 5. Karakteristik Responden berdasarkan Bidang Keilmuan

Karakteristik		Jumlah	%
Bidang Keilmuan	Ekonomi	111	54,41%
	Non-Ekonomi	93	45,59%
Total		204	100%

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 111 bendahara (54,41%) yang memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan posisinya yaitu ekonomi. Sedangkan sisanya sebanyak 93 orang (45,59%) berasal dari bidang keilmuan lain/non-ekonomi.

Karakteristik Berdasarkan Lama Menjabat Sebagai Bendahara

Karakteristik responden yang terakhir adalah lama waktu menjabat sebagai bendahara. Untuk jenjang lama bekerja yang sesuai dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah, <2 tahun, 2-5 tahun dan >5 tahun. Data disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menjabat Sebagai Bendahara

Karakteristik	Jumlah	%
Lama Menjabat Sebagai Bendahara	<2	17 8,33%
	2-5 Tahun	47 23,04%
	>5	140 68,63%
Total	204	100%

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 17 bendahara (8,33%) yang telah menjabat sebagai bendahara selama kurang dari 2 tahun, 47 bendahara (23,04%) yang telah menjabat sebagai bendahara selama 2-5 tahun, dan terakhir 140 bendahara (68,63%) yang telah menjabat sebagai bendahara lebih dari 5 tahun.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan yang diajukan benar-benar mengukur variabel yang diinginkan. Mendasar ke pada nilai *r* hitung dan signifikansi. Jika *Sig* < 0,05 dikatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sumber Daya Manusia

Item	<i>r</i> hitung	<i>Sig.</i>	Keterangan
SDM 1	0,760	0,000	Valid
SDM 2	0,780	0,000	Valid
SDM 3	0,733	0,000	Valid
SDM 4	0,755	0,000	Valid
SDM 5	0,787	0,000	Valid

Diperoleh hasil uji validitas masing-masing pernyataan pada Sumber Daya Manusia (X1) dinyatakan valid. Dari tabel 7 menunjukkan seluruh pernyataan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel sumber daya manusia sehingga semua pertanyaan pengujian dianggap memenuhi syarat pengujian (*Sig* < 0,05).

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi

Item	<i>r</i> hitung	<i>Sig.</i>	Keterangan
TI 1	0,632	0,000	Valid
TI 2	0,744	0,000	Valid
TI 3	0,709	0,000	Valid
TI 4	0,604	0,000	Valid
TI 5	0,707	0,000	Valid

Diperoleh hasil uji validitas masing-masing pernyataan pada Teknologi Informasi (X2) dinyatakan valid. Dari tabel 8 menunjukkan seluruh pernyataan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel teknologi informasi sehingga semua pertanyaan pengujian dianggap memenuhi syarat pengujian (*Sig* < 0,05).

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Aturan Hukum

Item	<i>r</i> hitung	<i>Sig.</i>	Keterangan
HKM 1	0,808	0,000	Valid
HKM 2	0,855	0,000	Valid
HKM 3	0,833	0,000	Valid
HKM 4	0,413	0,000	Valid
HKM 5	0,725	0,000	Valid

Diperoleh hasil uji validitas masing-masing pernyataan pada Aturan Hukum (X3) dinyatakan valid. Dari tabel 9 menunjukkan seluruh pernyataan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel aturan hukum sehingga semua pertanyaan pengujian dianggap memenuhi syarat pengujian ($Sig < 0,05$).

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Ketepatan Waktu

Item	r hitung	Sig.	Keterangan
WKT 1	0,595	0,000	Valid
WKT 2	0,649	0,000	Valid
WKT 3	0,739	0,000	Valid

Diperoleh hasil uji validitas masing-masing pernyataan pada Ketepatan Waktu (Y) dinyatakan valid. Dari tabel 10 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel ketepatan waktu sehingga semua pertanyaan pengujian dianggap memenuhi syarat pengujian ($Sig < 0,05$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban seseorang. Hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha*, apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan reliabel.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X1)	0,820	5	Reliabel
Teknologi Informasi (X2)	0,710	5	Reliabel
Aturan Hukum (X3)	0,788	5	Reliabel
Ketepatan Waktu (Y)	0,861	3	Reliabel

Berdasarkan tabel diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel $> 0,6$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan pada penelitian sudah reliabel.

Analisis Deskriptif

Berikut merupakan hasil analisis deskriptif:

Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sumber Daya Manusia	204	2,8	4	3,492	0,457
Teknologi Informasi	204	2,8	4	3,498	0,404
Aturan Hukum	204	2,6	4	3,361	0,427
Ketepatan Waktu	204	1,6	4	3,493	0,460

Dari hasil analisa data tersebut dapat diperoleh kesimpulan atau deskripsi setiap variabel dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Variabel Sumber Daya Manusia (X1) diperoleh nilai minimum 2,8, nilai maksimum 4, dengan rata-rata 3,492 dan standar deviasi 0,457.
- 2) Variabel Teknologi Informasi (X2) diperoleh nilai minimum 2,8, nilai maksimum 4, dengan rata-rata 3,498 dan standar deviasi 0,404.
- 3) Variabel Aturan Hukum (X3) diperoleh nilai minimum 2,6, nilai maksimum 4, dengan rata-rata 3,361 dan standar deviasi 0,427.
- 4) Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Y) diperoleh nilai minimum 1,6, nilai maksimum 4, dengan rata-rata 3,493 dan standar deviasi 0,460.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu data dari variabel penelitian. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kriteria uji normalitas diterima apabila jika nilai signifikan hasil perhitungan $> 0,05$.

Berikut merupakan hasil uji normalitas:

Tabel 13. Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	,046	204	,200

Diperoleh nilai Sig. uji normalitas menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolenieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi di antara variabel independen.

Berikut merupakan hasil uji multikolenieritas:

Tabel 14. Hasil Uji Multiolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sumber Daya Manusia (X1)	,803	1,246
Teknologi Informasi (X2)	,733	1,363
Aturan Hukum (X3)	,822	1,216

Diperoleh hasil nilai VIF pada masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Sumber Daya Manusia (X1), diperoleh nilai Tolerance sebesar 0,803 (Tolerance $> 0,10$) nilai VIF sebesar 1,246 (VIF < 10) sehingga disimpulkan bahwa Variabel Sumber Daya Manusia (X1) tidak terdapat multikolinieritas dan asumsi multikolinieritas terpenuhi.
2. Variabel Teknologi Informasi (X2), diperoleh nilai Tolerance sebesar 0,733 (Tolerance $> 0,10$) nilai VIF sebesar 1,363 (VIF < 10) sehingga disimpulkan bahwa Variabel Teknologi Informasi (X2) tidak terdapat multikolinieritas dan asumsi multikolinieritas terpenuhi.
3. Variabel Aturan Hukum (X3), diperoleh nilai Tolerance sebesar 0,822 (Tolerance $> 0,10$) nilai VIF sebesar 1,216 (VIF < 10) sehingga disimpulkan bahwa Variabel Aturan Hukum (X3) tidak terdapat multikolinieritas dan asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Item	Sig.
Sumber Daya Manusia (X1))	0,831

Teknologi Informasi (X2)	0,809
Aturan Hukum (X3)	0,548

Diperoleh data berdasarkan tabel diperoleh nilai *Signifikansi* untuk masing-masing variabel $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heterokedastisitas dan asumsi heterokedastisitas dipenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui nilai pengaruh tiap variabel independen yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi dan aturan hukum untuk memperkirakan variabel dependen yaitu ketepatan waktu.

Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Prediksi	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Constant	2,957	+	5,921	0,000	
Sumber Daya Manusia (X1)	0,277	+	9,365	0,000	H1 didukung
Teknologi Informasi (X2)	0,073	+	2,385	0,018	H2 didukung
Aturan Hukum (X3)	0,067	+	2,871	0,005	H3 didukung

Berdasarkan output maka dapat dibentuk model regresi sebagai berikut.

$$Y = 2,957 + 0,277 X1 + 0,073 X2 + 0,067 X3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Berikut merupakan hasil uji dari koefisien determinasi:

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 ^a	.471	.463	0,840

Diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,463. Hal tersebut bermakna bahwa Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Y) mampu dijelaskan sebesar 46,3% oleh variabel independen yaitu Jika Variabel Sumber Daya Manusia (X1), Variabel Teknologi Informasi (X2) dan Variabel Aturan Hukum (X3). Sedangkan sisanya 53,7% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diikuti pada penelitian.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi. Kriteria untuk pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut, Jika F statistik dan sig $< 0,05$, maka variabel independent (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara signifikan.

Berikut merupakan hasil uji F:

Tabel 18. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125,426	3	41,809	59,311	.000 ^b
	Residual	140,981	200	0,705		
	Total	266,407	203			

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) dapat dilihat hasil f statistik sebesar 59,311 dan signifikansi $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Aturan Hukum berpengaruh terhadap variabel Ketepatan Waktu secara signifikan.

Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil uji T:

Tabel 19. Hasil Uji T

Variabel	B	Prediksi	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Constant	2,957	+	5,921	0,000	
Sumber Daya Manusia (X1)	0,277	+	9,365	0,000	H1 didukung
Teknologi Informasi (X2)	0,073	+	2,385	0,018	H2 didukung
Aturan Hukum (X3)	0,067	+	2,871	0,005	H3 didukung

Diperoleh nilai signifikansi Uji Statistik t untuk masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut.

1. Variabel Sumber Daya Manusia (X1)

Diperoleh nilai signifikansi Uji Statistik dengan kriteria pengujian hipotesis jika Sig. t sebesar $0,000 < 0,05$ dan B pada variabel sumber daya manusia (X1) sebesar 0,277 sesuai dengan yang diprediksi. Maka H1 didukung yang artinya Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Y).

2. Variabel Teknologi Informasi (X2)

Diperoleh nilai signifikansi Uji Statistik dengan kriteria pengujian hipotesis jika Sig. t sebesar $0,018 < 0,05$ dan B pada variabel teknologi informasi (X2) sebesar 0,073 sesuai dengan yang diprediksi. Maka H2 didukung yang artinya Teknologi Informasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Y).

3. Variabel Aturan Hukum (X3)

Diperoleh nilai signifikansi Uji Statistik dengan kriteria pengujian hipotesis jika Sig. t sebesar $0,005 < 0,05$ dan B pada variabel aturan hukum (X3) sebesar 0,067 sesuai dengan yang diprediksi. Maka H3 didukung yang artinya Aturan Hukum (X3) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Y).

Pembahasan

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatan Waktu

Pada penelitian ini dapat diperoleh bukti bahwa sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja. Hasil tersebut berarti bahwa hipotesis pertama didukung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binsar (2013) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Sumber daya manusia dari bendahara yang dimiliki oleh satuan kerja dikategorikan baik, mereka kebanyakan sudah berasal dari bidang keilmuan yang sesuai dan juga kebanyakan dari mereka telah memiliki pengalaman bekerja sebagai bendahara selama lebih dari lima tahun. Dari pihak KPPN sendiri juga sering mengadakan pendampingan dan juga pelatihan untuk bendahara sehingga kemampuan mereka menjadi lebih terasah lagi. Beberapa faktor tadi akhirnya membuat kualitas sumber daya manusia menjadi bagus dan terampil sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu

Pada penelitian ini dapat diperoleh bukti bahwa teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja. Hasil tersebut berarti bahwa hipotesis kedua didukung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binsar (Jumardi *et al.*, 2022) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan lrpj. Teknologi informasi yang dapat menunjang ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban yakni jumlah komputer yang ada di lingkungan kerja bendahara telah memenuhi dan juga spesifikasinya telah memadai untuk menunjang berbagai aplikasi yang digunakan seperti SAKTI dan SPRINT. Selain itu peran jaringan juga sangat penting dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara, apabila jaringan yang digunakan lambat maka akan menghambat proses input/upload data yang dibutuhkan dalam laporan pertanggungjawaban bendahara. Sehingga teknologi informasi berpengaruh dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja.

Pengaruh Aturan Hukum terhadap Ketepatan Waktu

Pada penelitian ini dapat diperoleh bukti bahwa aturan hukum berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hasil tersebut berarti bahwa hipotesis ketiga didukung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binsar (2013) yang menjelaskan bahwa aturan hukum memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Aturan hukum disini berasal dari Kementerian Keuangan maupun dari Direktorat Jendral Perbendaharaan. Aturan yang paling mengikat adalah PER-03/PB/2014. Peraturan tersebut salah satunya mengatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara yaitu paling lambat atau maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ke KPPN. Peran KPPN juga sangat penting dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja karena sering memberikan peringatan agar bendahara paham dan patuh atas ketentuan yang ada. Sehingga aturan hukum berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan aturan hukum terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja di lingkup KPPN Yogyakarta yakni sebagai berikut, sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hasil tersebut berarti hipotesis pertama didukung. Teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hasil tersebut berarti bahwa hipotesis kedua didukung. Aturan hukum berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hasil tersebut berarti bahwa hipotesis ketiga didukung. Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan penulis di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai masukan sebagai berikut, Bagi bendahara sebaiknya terus belajar mengenai sistem yang sudah disediakan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban serta meningkatkan ketelitian saat penyusunan laporan pertanggungjawaban agar data yang diberikan maksimal dan minim kesalahan untuk perbaikan. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta hendaknya melakukan lebih banyak sosialisasi dan mengadakan web yang sudah berisikan *FAQ* atas permasalahan yang dihadapi oleh satker. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja karena di dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 46,3% maka 53,7% bisa dijelaskan oleh variabel aksesibilitas wilayah dan pengendalian internal, dan menyebarkan kuesioner tepat di awal bulan saat momen bendahara menyampaikan laporannya ke KPPN.

References

- Ali, K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(3), 45–59.
- Binsar, A. (2013). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Uakpa (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Malang)*. Malang: Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Gordon, L. A., & Narayanan, V. K. (1984). Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty And Organization Structure: An Empirical Investigation. *Accounting, Organizations and Society*, 9(1), 33–47.
- Jumardi, Rajagukguk, H., & Machmury, A. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2029–2046.
- Nahartyo, E., & Indriasari, D. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI*, 23–24.
- Perdirjen Perbendaharaan RI. (2014). *Perdirjen Perbendaharaan No.3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban pada Satker Pengelola APBN*. Jakarta: Perdirjen Perbendaharaan RI.
- Puspaningsih, V. D. (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD (Studi Empiris pada SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Samsudin, S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, S. P. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi*. Yogyakarta: Andi Offset.